

Sittlichkeit dan Bonum Commune ala Hegel

by Aloysius Widyawan Louis

Submission date: 19-Mar-2024 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2313978164

File name: file_Sittlichkeit_dan_Bonum_Commune_ala_Hegel_20240318_0001.pdf (22.05M)

Word count: 7290

Character count: 61175



Sittlichkeit dan *Bonum Commune* ala Hegel

Oleh
Aloysius Widyawan L.

Bonum commune adalah gagasan klasik yang merujuk pada tujuan-tujuan akhir yang secara kodrati hendak dicapai oleh suatu polis. Aristoteles tidak menjabarkan secara spesifik. Meskipun demikian, ada andaian kuat bahwa kodrat manusia selalu mengejar kebaikan dan bahwa secara kodrati pula, kepenuhan manusia tercapai ketika ia terlibat dalam kehidupan polis. *Bonum commune* dapat terwujud jika manusia-manusia di dalam polis hidup berkeutamaan sehingga beretika berarti sama pula dengan berpolitik.²³⁵ Gagasan itu kemudian dikembangkan

²³⁵ Ibid. Franz Magnis Suseno, "Hegel tentang Moralitas dan Struktur Sosial", dalam *Filsafat Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 113.

oleh para filsuf skolastik, terutama Thomas Aquinas bahwa *bonum commune* mendapatkan kepenuhannya dalam terang Tuhan, *Summum bonum*. *Bonum commune* Thomas Aquinas bakal menjadi kenyataan jika suatu negeri dipimpin oleh Sang Raja (Filsuf atau Orang Bijak) yang sekaligus Santo.²³⁶

Abad Pencerahan juga masih tetap berupaya menjabarkan *bonum commune* dengan semangat yang berbeda dengan semangat masa-masa sebelumnya. Upaya merefleksikan, merumuskan, dan mewujudkan *bonum commune* didorong oleh pemahaman-pemahaman baru tentang kodrat manusia dan sosialitasnya. Para pemikir pencetus Teori Kontrak Sosial memiliki andaian kondisi alamiah manusia yang menurut mereka lebih realistis dan masuk akal daripada pemikiran kodrat manusia dari pemikiran sebelumnya. Hobbes, Locke, dan Rousseau mempertimbangkan bahwa kondisi alamiah manusia yang ingin bebas, tetap bertahan hidup, dan mendapatkan hak milik menuntut manusia mencari jaminan dari setiap upaya yang dilakukannya. Hidup sosial itu bukan kodrati, tetapi merupakan hasil kesepakatan individu-individu yang ingin hidupnya, miliknya, masa depannya terjamin. Karena itu, *bonum commune* atau tujuan dari adanya realitas sosial adalah untuk menjamin kepentingan-kepentingan individu.²³⁷ Dalam bentuk yang lebih konkret, Adam Smith menunjukkan bahwa *bonum commune* tetap bisa menjadi tujuan tertinggi suatu masyarakat tanpa mengurangi kebebasan individu untuk meningkatkan modal atau kesejahteraan hidupnya. Smith menyinggung bahwa hal itu sangat mungkin terwujud karena pada dasarnya setiap individu itu baik, memiliki moralitas yang tercermin dalam tujuan-tujuan baik, dan sikap tahu batas.²³⁸

²³⁶ Lih. Ramon Nadres, "*Bonum commune* dalam Pemikiran St. Thomas Aquinas: Sang Raja, Santo, dan *Bonum commune*", makalah Extension Course 2016 Pertemuan ke-5

²³⁷ Anastasia Jessica Adinda, "*Bonum commune* dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial", makalah Extension Course 2016 Pertemuan ke-6

²³⁸ Dalam gagasan *invisible hand* yang sering disalahmengerti, bahkan dilepaskan dari konteks moralitas Smith, gagasan pasar bebas pun dengan demikian tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai etis. Konkretnya, negara harus bisa menerjemahkan luasnya penafsiran positif atas peran *invisible hand* itu dalam aneka kebijakan untuk kemakmuran bersama, khususnya yang membuka akses seluas-luasnya agar seluruh individu bisa mengusahakan kemakmurannya. Korporasi pun harusnya lebih menekankan pendekatan *stakeholder* daripada *shareholder*

Di penghujung Abad Pencerahan, lahirlah sebuah gerakan filosofis di Jerman²¹⁹ yang dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804). Idealisme Jerman ini ditandai dengan lahirnya metafisika gaya baru yang menggantikan metafisika gaya lama (Aristoteles dan Skolastik) dan metafisika rasionalis (Leibniz dan Wolff). Jika metafisika lama bertumpu pada objek, dari hasil analisisnya terhadap metafisika lama tersebut, Kant justru bertumpu pada pengenalan subjek atas objek. Kant menyebutnya *Revolusi Copernican* di ranah filsafat. Investigasi metafisika bukan lagi pada objek karena segala pengenalan bergantung pada kapasitas subjek. Lebih jauh lagi, Kant menyebut bahwa subjek yang ia pikirkan bukanlah subjek individualis, tetapi subjek transendental. Kant juga sadar bahwa perubahan orientasi juga terjadi pada analisis terhadap suatu tindakan moral sebab pintu masuk pada pemahaman akan realitas juga bisa lewat tindakan moral yang didasarkan pada kebebasan manusia. Subjek tetap merupakan fokus yang utama, juga dalam analisis atas tindakan moral. Teori Moral Kantian sangat berpengaruh pada filsafat moral sesudahnya, sama dengan besarnya pengaruh Teori Pengetahuan Kantian bagi abad selanjutnya.

Perubahan orientasi ini dirasa masih kurang tajam oleh beberapa filsuf sesudah Kant, khususnya Fichte, Schelling, dan Hegel. Meskipun titik berat kritik berbeda-beda, ketiga filsuf ini berupaya meradikalkan Kritisisme Kant. Akal budi murni ternyata tak mampu menembus realitas dalam dirinya sendiri (*das ding an sich*). *Das ding an sich* masih tetap sesuatu yang tak dapat dikenali oleh akal budi manusia. Pengetahuan manusia hanya cukup sampai pada hasil olah representasi

agar dengan caranya yang khas, korporasi tetap dapat terlibat dalam upaya membawa nilai-nilai etis di medan persaingan bebas sekalipun ... Lih. Herlina Yoka Roida, "Bisnis *commune* dalam Gagasan Para Pemikir Pasar Bebas: Moral dan Modal," makalah Extension Course 2016 Pertemuan ke-7.

²¹⁹ Jerman pada waktu itu bukanlah negara Jerman pada masa ini, melainkan lebih baik mengacu pada beberapa negara otonom yang cukup luas wilayahnya termasuk di dalamnya wilayah-wilayah Belanda, sebugian Rusia, bahkan Skandinavia. Hegel, misalnya, sering menggunakan istilah *Germanische* atau dunia Jerman yang kadang mengacu pada keseluruhan wilayah yang bekas Kekaisaran Suci Romawi Jerman, kadang pula pada daerah-daerah di wilayah kekaisaran lama yang dipengaruhi oleh gerakan Reformasi. Bdk. Peter Singer, "Hegel", dalam *German Philosopher*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 133-138.

yang merupakan hasil cernaan indera atas objek dalam akal budi manusia yang tersusun atas kategori-kategori. Hasil olah budi itu pun tak mampu memahami Tuhan, dunia, dan jiwa. Ketika menganalisis tindakan-tindakan moral, Kant pun berhenti pada gagasan kebebasan, imortalitas jiwa, dan Tuhan.

Apa yang dilakukan Kant untuk memahami realitas dengan akal budi murni dan praktis ternyata kembali ke jalan buntu yang dihadapi Abad Modern, yakni jatuh pada agnostisisme dan skeptisisme. Karena itu, idealisme Jerman sesudah Kant berusaha melengkapi kekurangan Kant dengan cara menyingkirkan gagasan tentang *das ding an sich*. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada sesuatu yang tersembunyi dan lepas bebas dari pengetahuan manusia. Bagi Fichte, Kant dianggap tidak konsisten karena²⁴⁶: 1) *Das ding an sich* menjadi penyebab unsur materi dari penginderaan. *Das ding an sich* melampaui kemampuan pengetahuan kita. Artinya, kemampuan manusia untuk mengetahui realitas kembali diragukan. Kant ingin melawan skeptisisme Hume, namun ia pun akhirnya membangun skeptisismenya sendiri; 2) *Das ding an sich* itu tidak mungkin diketahui, tapi mengapa term tersebut dimunculkan oleh Kant. Itu berarti Kant tak lebih dari seorang dogmatis yang tidak mampu menjabarkan gagasan-gagasannya secara rasional. Kalau Kant menjadi seorang dogmatis, itu berarti Kant tidak konsisten karena Kant menyatakan dirinya anti-dogmatisme.

Tinggallah subjek yang perlu dibahas, yakni subjek yang berpikir dan bertindak. Di sini, subjek yang dibahas bukanlah subjek-subjek partikular, tapi subjek transendental (Kant), Subjek Murni (Fichte), atau Yang Absolut (Hegel). Tinggallah pula kebebasan rasional dan cukup mampu membangun dunia dari dalam dirinya sendiri, realitas dalam segala totalitas yang nampak sebagai hasil pikiran. Pada akhirnya, sampailah pada klaim rasionalisme modern, yakni independensi roh manusia. Roh manusia tidak bergantung pada apa pun di luar dirinya sendiri. Idealisme kemudian mengungkapkan rahasia paling dalam dari

²⁴⁶ Ibid. Jose Luis Fernandez dan Maria Jesus Soto, *Historia de la filosofia moderna*, Pamplona: Eunsa, 2006, hlm. 297-298.

dunia dan makna total dari eksistensi manusia. Di dalam idealisme, ada keyakinan besar pada kemampuan akal budi manusia dan pencapaian filsafat.

Idealisme Jerman memuncak pada pemikiran Hegel. Oleh banyak pakar, Hegel ini dianggap filsuf modern yang paling berpengaruh bagi filsuf kontemporer. Bahkan, ada pandangan bahwa isi seluruh sejarah filsafat Barat selanjutnya adalah upaya sekuat tenaga merobohkan bangunan filsafat Hegelian.²⁴¹

Hegel memang tidak menulis secara eksplisit tentang *bonum commune*, tetapi kita bisa menganalisis beberapa pemikirannya karena ia nyaris tidak memisahkan antara moral dan politik sama seperti Aristoteles. Hanya saja, kita perlu memahami lebih dulu kerangka sistematis filsafat Hegel. Setelah itu, kita mencoba mendalami secara serius refleksi Hegel atas sejarah dan kenyataan sosial manusia. Di sanalah, kita akan memahami pertautan moral dan politik dalam gagasan *Sittlichkeit* atau tatanan moral-sosial.²⁴² Gagasan *Sittlichkeit* inilah yang akan kita analisis apakah bisa menjadi *bonum commune*.

SEKILAS TENTANG SISTEM FILSAFAT HEGEL

Yang Absolut

Titik tolak filsafat Hegel adalah Yang Absolut (*das Absolute*). Bagi Hegel, Yang Absolut secara sederhana adalah *autoconscience* atau kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Yang Absolut lebih merupakan subjek yang aktif (sadar) bukan sebagai substansi atau sesuatu yang pasif. Yang Absolut adalah totalitas atau keseluruhan antara yang ideal dan yang real. Yang Absolut adalah sintesis dari segala sesuatu yang berposisi. Yang Absolut adalah realitas “menjadi” yang merupakan kesatuan dialektis antara “ada” dan “tidak-ada”. Yang

²⁴¹ Bdk. Budi Hardiman, *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 172.

²⁴² Untuk menghindari salah tafsir atas istilah *Sittlichkeit*, penulis mengikuti terjemahan Franz Magnis Suseno dalam Franz Magnis Suseno, “Hegel tentang Moralitas dan Struktur Sosial”, hlm. 107-112; lihat juga, Simon Petrus Lily Tjahjudi, *Petualangan Intelektual*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 325.

Absolut bukanlah realitas statis seperti yang dipikirkan oleh Parmenides, Spinoza ataupun Schelling. Yang Absolut adalah identitas dalam perbedaan, ketunggalan dalam kebhinnekaan, subjek sekaligus objek. Sebagai realitas yang “menjadi”, semua hal yang bertentangan dan berbeda dalam keseluruhan realitas secara utuh terangkum padanya.

Yang Absolut itu dinamis memanifestasikan dirinya sendiri dan menyadari dirinya sendiri. Gerak Yang Absolut berupa dialektika. Dialektika pada prinsipnya adalah negasi dari prinsip tradisional yakni Prinsip Non-kontradiksi karena dari prinsip itu, tidak mungkin kita memahami bahwa Yang Absolut bisa menyatukan yang ada dan yang tiada. Bagi Hegel, kontradiksi itu menjadi kekuatan yang mendorong Yang Absolut menampilkan dan mengekspresikan dirinya dalam suatu proses suksesif dari tesis (*being*), antitesis (*non-being*), dan sintesis (*becoming*) melalui suatu aktivitas yang pada saat yang sama sirkular dan progresif. Sintesis tidaklah meniadakan kontradiksi-kontradiksi itu, melainkan mengatasinya. Dalam dinamika itu, Yang Absolut itu adalah tujuan (*teleos*) dari proses sekaligus subjek pelaku proses dan sekaligus juga objek dari proses itu.

Dialektika ini kemudian menjadi hukum bagi realitas dan pengetahuan. Konsepsi dialektika ini bisa diperbandingkan dengan pemikiran klasik Herakleitos. Filsafat Hegel kemudian berupaya untuk menampilkan gerak proses, suksesif dan progresif dari Yang Absolut.

Dialektika Yang Absolut

Dinamika Yang Absolut menurut Hegel adalah suatu proses yang dialektis. Tidaklah mudah menjabarkan apa itu dialektika Hegel. Dialektika diambil dari peristiwa perbincangan sehari-hari. Dalam setiap perbincangan, ada yang berpendapat, ada yang menyanggah, ada pula yang mencoba menyatukan pendapat-pendapat itu. Perbedaan pendapat, bahkan konflik seringkali muncul. Meskipun demikian, perbincangan yang baik harus mampu merangkum segala apa yang terjadi sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang berlawanan pun tetap harus disatukan. Karena itu, dari suatu pernyataan (tesis),

dan sanggahannya (antitesis), lahirlah sintesis yang menyatukan dan mengatasi perbedaan-perbedaan.

Dalam *Phenomenology of the Spirit*, dialektika yang dipakai untuk menjelaskan struktur kebenaran dan sejarah, memiliki karakter-karakter sebagai berikut²⁴³

1. Roh esensi rasional memerlukan 'yang-lain', baik berupa eksistensi empirik, penampakan, kekeliruan, maupun penderitaan, sebagai medium yang harus ada. Hanya melalui medium itu, esensi rasional dapat berkembang dan teraktualisasikan. Esensi rasional harus menjadi sesuatu yang lain dari dirinya sendiri supaya dapat kembali kepada dirinya sendiri dalam tingkatan yang lebih tinggi, yakni sebagai yang teraktualisasi
2. Konsekuensinya, esensi rasional secara aktual hanya ada pada akhir, yakni hasil dari pengenalan dirinya sendiri. Di luar itu, tidak ada yang aktual, melainkan abstrak atau tersembunyi. Dibutuhkan proses yang panjang, berat, dan beranekaragam untuk mengaktualisasi diri dan menjadi sebagaimana adanya.
3. Logika dialektika ini mengikuti suatu struktur mental yang dinamis yang di dalamnya kesadaran diri (*self-consciousness*) dan identitas diri (*self-identity*) menjadi tujuan di bagian akhir.
4. Dalam sistem yang mengekspresikan kehidupan dan evolusi kesadaran, negasi atau sanggahan bukanlah upaya menghapus hasil dari proses sebelumnya, tetapi disimpan dalam tahap berikutnya sebagai semacam rekoleksi. Karena itu, bentuknya adalah afirmasi, negasi atas afirmasi, negasi atas negasi, dst.
5. Dialektika Hegel ini melihat evolusi roh sebagai suatu proses teleologis yang membuat siklus, bahkan spiral yang di dalamnya bagian akhir adalah bagian permulaan. Dengan kata lain, tujuan yang diaktualisasikan dalam bagian akhir adalah juga awal dari proses dalam rupa yang abstrak. Gerak dialektis ini dimungkinkan berhenti ketika semua kontradiksi diperdamaikan di dalam kepenuhan aktualisasi

²⁴³ Yinniyahu Yovel, *Hegel's Preface of Phenomenology of Spirit*, Princeton, Princeton University Press, 2005, hlm. 36-37.

6. Karena itu, dari perspektif dialektika, posisi-posisi yang berlawanan dalam roh tidaklah saling mengeksklusifkan diri. Mereka justru saling melengkapi dan memodifikasi diri di dalam kerangka kerja yang lebih tinggi totalitasnya. Benar dan salah itu pasangan, demikian juga dalam seluruh ranah kehidupan yang lain, misalnya moral, politik, religi, seni, dsb. Dalam kajian kontemporer, logika dialektika ini mengekspresikan logika multikulturalisme yang mendasarkan diri pada kebenaran absolut, bukan relativisme atau skeptisisme.

Sistem Filsafat Hegel

Hegel memaparkan sistem filsafatnya secara lengkap di *Encyclopedia of Philosophical Sciences*. Dalam karyanya itu, Hegel menyebut bahwa filsafat merupakan investigasi yang seksama atas realitas melalui pikiran dengan cara refleksi. Objek filsafat adalah kebenaran tunggal, yakni Yang Absolut atau Idea atau Tuhan atau Roh dan segala sesuatu yang terbatas yang dihasilkannya.

Ada tiga bagian utama dalam *Encyclopedia*, yakni Logika, Filsafat Alam, dan Filsafat Roh. Tiga pembagian ini juga menurut Hegel mengikuti tiga proses Roh Absolut, yakni Idea – Alam – Roh. Logika (= metafisika) mempelajari hakikat Yang Absolut pada dirinya sendiri (*an sich*). Filsafat Alam mempelajari Yang Absolut yang mengalienasi dirinya dalam alam (*for sich*). Filsafat Roh yang mempelajari Yang Absolut yang mengenali kembali dirinya sendiri (*an und for sich*).

Secara khusus, pada proses Roh yang ketiga, proses dinamika Roh dijabarkan dalam karya Hegel berjudul *The Philosophy of Right* (PR) dan beberapa karya lain. Filsafat Roh adalah kelanjutan dari Filsafat Alam karena Roh adalah proses yang melampaui proses dunia natural. Setelah “mengembara” di dunia yang penuh kontradiksi, Roh Absolut kembali ke interioritasnya, pada kesadarannya sendiri sebagai roh sampai kembali lagi pada dirinya sendiri.

Ada tiga bagian dalam Filsafat Roh, yakni: 1) Roh Subjektif, yakni roh sejauh dipahami yang terealisasi dalam aktivitas mengetahui dan bebas; 2) Roh Objektif, yakni roh yang terealisasi dalam produk-

produk hasil aktivitas bebas, yakni hidup moral dan sosial; 3) Roh absolut, yakni roh infinitif sebagai sintesis universal dan total dari roh dalam dirinya sendiri

Setelah mengalienasikan diri ke alam, roh kembali pada dirinya sendiri, mulai dari prinsip-prinsip yang terikat dan terbatas, yakni pada subjek individual. Di sini, bukan pertama-tama roh nampak dalam hal-hal yang terbatas, tetapi sebaliknya bagaimana yang terbatas nampak di dalam roh. Evolusi roh subjektif berjalan melalui tiga etape, yakni: 1) Antropologi, yakni: roh hadir pada individualitas. Pada fase ini, roh individual adalah jiwa sejauh bersatu dengan tubuh. Jiwa sendiri melalui dua proses sebelumnya, yakni dari a) jiwa natural, yakni jiwa universal atau jiwa dunia, suatu substansi universal yang hadir dalam individualitas, dan dari b) jiwa sensitif yang pada dasarnya merujuk pada perasaan-perasaan; 2) Fenomenologi roh, yakni tahap dialektis kedua di dalam roh subjektif yang berupa kesadaran memahami diri sendiri; 3) Psikologi: tahap dialektis selanjutnya karena di dalam psikologi, roh memahami segala bentuk manifestasi universal dan aktivitas yang cenderung lebih spiritual.

Dari sinilah, muncul pemahaman tentang konsepsi 1) roh teoritis, yakni proses yang di dalamnya rasio menampilkan aktivitas berpikir, 2) roh praktis atau kehendak, yakni inteligensia yang kembali pada dirinya sendiri, dan 3) roh bebas yakni titik puncak aktivitas roh. Kebebasan adalah kesatuan antara roh teoritis dan roh praktis, kehendak yang rasional yang sampai pada determinasi universal, tidak bergantung pada kondisi-kondisi terbatas dari individu

Roh objektif dipandang sebagai pemikiran hegelian yang khas.²⁴⁴ Dengan adanya kebebasan, roh keluar dari subjektivitasnya dan masuk ke dunia yang konkret dari manifestasi objektif, yakni karya-karya aktivitas rasional yang bebas, seperti institusi sosial dan yuridis. Dengan demikian, roh objektif adalah satu tahap realisasi kebebasan yang dipahami sebagai kehendak rasional.

²⁴⁴ Jose Luis Fernandez dan Maria Jesus Soto, *Historia de la filosofia moderna*, hlm. 340.

Gagasan Tentang Manusia Menyejarah, Kebebasan, dan Sejarah Dunia

Berbeda dengan kebanyakan pemikir Filsafat Modern yang berpendapat bahwa kodrat manusia itu sesuatu yang tetap sehingga memikirkan sejarah berubah itu sungguh tidaklah real, Hegel justru berkeyakinan pada hal yang sebaliknya.²⁴⁵ Hegel menekankan perspektif evolusioner dalam sejarah bahwa negara dan segala sesuatu yang terkait dengan manusia itu harus dilihat dalam suatu proses. Ia mengikuti pandangan Schiler bahwa hal paling mendasar dari kondisi manusia dapat berubah dari waktu ke waktu.²⁴⁶

Hegel yakin bahwa sejarah memiliki tujuan dan tujuan itu rasional. Ia juga meyakini bahwa sejarah adalah aspek esensial dari hidup manusia sehingga dimensi historis harus dilihat dalam suatu perspektif yang lebih global, bahkan dalam perspektif kosmik di mana sejarah manusia ini bagian dari kelanjutan perkembangan kosmis sebagai satu keseluruhan. Sejarah tidak bergulir tanpa makna dan tanpa keterkaitan dengan berbagai peristiwa. Sejarah itu dipandang sebagai pemenuhan secara gradual potensi rasional kita dalam kebebasan. Selalu ada yang menyatukan, bahkan menyatukan pula dua hal yang bertolak belakang, yakni makna. Karena itu, sejarah sebenarnya adalah rasionalitas yang secara penuh eksplisit dan menyadari diri sendiri dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kebebasan yang penuh.

Sejarah dunia, menurut Hegel, adalah kemajuan dalam kesadaran akan kebebasan. Ia menyelidiki sejarah manusia dari bangsa-bangsa oriental (India, Tiongkok, dan Persia) dan bangsa-bangsa Barat (mulai dari Yunani, Romawi dan datangnya kekristenan, sampai pada Reformasi Protestantisme dan Revolusi Prancis). Ia menemukan bahwa kebebasan benar-benar tumbuh dan berkembang dalam kekristenan, secara khusus dalam Reformasi Lutheran. Dalam masa reformasi, semua individu mendapatkan kebebasan sebagaimana layaknya karena tidak bersandar

²⁴⁵ Lili, Leo Rauch, "Hegel, Spirit, dan Politics", dalam *Routledge History of Philosophy Volume 6*, Robert C. Salomon and Kathleen M. Higgins (eds.), New York, 2004, hlm. 255.

²⁴⁶ Bdk. Peter Singer, "Hegel", dalam *German Philosophers*, Oxford, Oxford University Press, 1997, hlm. 123.

pada hal-hal lain di luar dirinya, seperti soal otoritas mengajar, imamat, dll.

Kesadaran akan kebebasan semakin diperkuat oleh peristiwa Revolusi Prancis. Cita-cita luhur Revolusi Prancis dilihat sebagai ekspresi paling nampak bagi kebebasan. Apalagi, dalam Revolusi Prancis, struktur sosial dan politik benar-benar menyesuaikan diri dengan keinginan rakyat untuk otonom dan bebas. Dari situ, nampak bahwa setiap individu diperlakukan sebagai manusia yang bebas.

Apa itu kebebasan? Bagi kaum liberal, kebebasan adalah absennya tekanan dalam bentuk apa pun sehingga seseorang bisa melakukan apa pun yang ia kehendaki. Bagi Hegel, kebebasan yang dipusatkan pada kebebasan, tapi mengabaikan segala situasi yang memengaruhi pilihan tersebut, hanyalah kebebasan semu, abstrak, atau formal. Pilihan-pilihan seseorang dipengaruhi oleh masyarakat di mana ia hidup dan bahwa masyarakat itu pun berada dalam suatu tahapan tertentu dalam proses sejarah.²⁴⁷

Kebebasan terkait dengan tiga hal, yakni otonomi, independensi, dan *self-determination*.²⁴⁸ Otonomi adalah daya untuk menentukan sendiri keputusan dan memiliki kapasitas membuat serta mengikuti aturan-aturannya sendiri. Independensi adalah sikap yang tidak mau bergantung pada apa pun karena sudah merasa mampu mencukupi diri sendiri (*self-sufficient*). *Self-determination* adalah kemampuan diri sendiri untuk menentukan tindakan dan ketika sudah menentukan, hanya diri sendirilah yang membuat tindakan itu memiliki nilai bagi diri sendiri. Ketiga unsur tersebut saling terkait sehingga membentuk pemahaman bahwa kebebasan adalah kehendak yang menghendaki dirinya sendiri.

Selain itu, terkait kebebasan Hegel juga mengatakan, "kita benar-benar bebas hanya jika kita mampu mengatasi partikularitas, bertindak secara universal dan objektif sesuai dengan konsep kehendak kita."

²⁴⁷ Peter Singer, "Hegel", hlm. 140-141, 144.

²⁴⁸ Robert Pippin, "Hegel's Practical Philosophy: Realization of Freedom", dalam *The Cambridge Companion to German Idealism*, (edited by Karl Ameriks), Cambridge, University of Cambridge, 2005, hlm. 197.

Tindakan yang bebas adalah tindakan yang kita lakukan tanpa ada unsur lain di luar diri kita. Ia menegaskan bahwa ketiadaan ketergantungan pada sesuatu yang lain adalah suatu kemenangan, bukan di luar yang lain, tetapi di dalam yang lain; suatu pencapaian aktualitas bukan dengan melarikan diri dari yang lain, tapi mengatasinya (EG p. 382A). Karena itu, Hegel selalu menyatakan bahwa kebebasan adalah bersama diri sendiri dalam sesuatu yang lain, yakni secara aktif mengaitkan diri pada sesuatu yang lain dengan cara mengintegrasikan diri pada suatu tindakan orang lain, melengkapi dan memenuhinya sehingga tindakan itu benar-benar tindakannya sendiri. Tindakan bebas ini mengandaikan tindakan kita adalah tindakan yang rasional. Karena itu, kebebasan itu aktual hanya pada masyarakat rasional yang memiliki institusi-institusi dirasa dan dikenali sebagai rasional oleh masing-masing individu

GAGASAN TENTANG *SITTlichkeit*

Secara garis besar, gagasan tatanan moral-sosial (*Sittlichkeit*) berada dalam proses dinamika Roh Objektif. Seperti yang telah dijelaskan sekilas, Roh Objektif berada di antara proses Roh Subjektif dan Roh Absolut. Dalam Roh Objektif ini, roh mengenali dirinya dalam berbagai tatanan objektif hasil pemikiran bebas, yakni dalam struktur tindakan moral dan struktur sosial yang ada.

Hukum, Moralitas, dan Tatanan Moral-Sosial (*Sittlichkeit*)

Kebebasan manusia, menurut Hegel, haruslah terungkap tidak hanya dalam tataran pribadi, tapi juga dalam struktur sosialnya karena dalam struktur sosial itulah, manusia mengekspresikan diri dan semakin mengenal dirinya. Dengan demikian, kebebasan juga harusnya terungkap dalam tiga elemen yang menggerakkan struktur sosial menuju ke arah kebebasan yang lebih konkret dan universal, yakni hukum, moralitas, dan tatanan moral-sosial (*Sittlichkeit*)

Hegel menolak pandangan umum bahwa hukum membatasi kebebasan. Baginya, hukum adalah tahap pertama menuju kebebasan. Dalam hukum, kehendak bebas merujuk pada persona sebagai subjek

dari hukum dan kewajiban. Kegagalan hukum hanyalah karena hukum itu abstrak sejauh tidak ada dalam individualitas persona

Karena itu, hukum harus dilengkapi oleh moralitas seperti yang digagas oleh Kant dalam terminologi “imperatif kategoris”. Kant menyadari bahwa tindakan moral jauh lebih berarti ketika tampak otonomi setiap orang tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam moralitas, sumber tindakan moral hanyalah kesadaran dan kehendak bebas subjek. Bagi Hegel, moralitas ini masih tetap formal, abstrak, bahkan kosong jika perwujudannya mengabaikan realitas sosialnya karena dalam realitas sosial itulah, kebebasan semakin rasional dan universal (*Philosophy of Right*/PR § 141)

Selanjutnya, terkait dengan ekspresi kebebasan dalam realitas sosial yang lebih rasional dan universal, Hegel menulis tentang *Sittlichkeit* dalam PR § 142

Tata hidup moral-sosial adalah ide tentang kebebasan sebagai cara hidup yang baik yang memiliki pengetahuan dan kemauan dalam kesadaran diri dan aktualitasnya melalui tindakan yang sadar. Demikian pula, pada makhluk etis, kesadaran diri sendiri memiliki tujuan yang memotivasi dan dasar yang memiliki hakikat di dalam dan bagi dirinya sendiri. Tata hidup moral-sosial adalah konsep kebebasan yang telah mengadakan dunia dan alam dari kesadaran dirinya²⁴⁹

Secara sederhana, *sittlichkeit* diartikan sebagai kesadaran moral masing-masing individu yang diwujudkan secara konkret dalam tata hidup bersama, dari tingkat terendah, yakni keluarga, masyarakat (*civil society*), dan negara. Hegel menyebut tatanan moral-sosial hadir secara subjektif dalam diri individu-individu sebagai karakter utama yang disyaratkan oleh suatu sistem rasional. Dalam masyarakat rasional, individu dapat menawarkan *self interest* mereka untuk derajat kepuasan tertentu tanpa harus memaksimalkannya, dan mereka tidak harus melakukan pengorbanan besar untuk memberikan prioritas pada hukum dan kewajiban atau menunjukkan kepedulian pada kebaikan orang lain. Bagi Hegel, karena kehidupan sosial selalu merupakan harmoni dengan

²⁴⁹ Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, hlm. 142.

individualitas kita, tatanan moral-sosial tidak membatasi kebebasan kita, tapi malah mengaktualisasikannya. Bagi Hegel, kebebasan seseorang justru terjadi ketika ia mengidentifikasi dirinya dengan institusi komunitasnya, yaitu dengan merasakan diri sendiri sebagai bagian dari yang lain sekaligus merasakan yang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri.

Tatanan Sosial-Moral (*Sittlichkeit*) dalam Struktur Sosial

Ada tiga tahap struktur sosial yang semakin tinggi semakin menunjukkan derajat realisasi kebebasan dalam tatanan sosial-moral. Tiga tahap struktural itu adalah keluarga, *civil society*, dan negara.

Keluarga adalah "substansialitas langsung dari Roh", yakni roh perasaan (*Empfindung*). Keluarga mencapai kelengkapannya dalam tiga aspek, yakni: pernikahan, eksternal eksistensi berupa kekayaan dan aset, serta pendidikan anak sampai terpisah dari keluarga (PR § 160). Keluarga memiliki kesatuan substansial, yakni membangun keseluruhan didasarkan pada kepercayaan diri masing-masing anggota dan berakhir pada diri sendiri yang di (dalamnya) setiap individu sadar memiliki realitasnya. Dalam keluarga, ada pembagian peran, misalnya lelaki juga untuk kebutuhan *civil society*, sedangkan wanita untuk keluarga (PR § 166). Ikatan dalam keluarga itu serba terbatas, misalnya keluarga bisa diceraikan (PR § 176), anak yang sudah berkeluarga keluar dari rumah orang tuanya dan membentuk keluarga sendiri (PR § 177), ketika bapak mati (PR § 178). Tatanan sosial-moral dalam keluarga nampak dalam upaya keluarga mencapai tujuan-tujuannya sekaligus memberi kontribusi pada masyarakat luas lewat berbagai peran yang bisa diambil.

Tahap kedua adalah *civil society*. Menurut Hegel, konsepsi *civil society* yang terdiri dari individu-individu bebas dengan berbagai peran dalam kehidupan bersama, secara historis baru dan masih terbatas secara geografis. Konsepsi ini adalah hasil dari kebudayaan Eropa yang diturunkan dari tatanan moral-sosial dalam tradisi Yunani dan spiritualitas Kristen. Konsepsi ini baru disadari sungguh-sungguh sejak Reformasi Lutheran dan semakin kuat pada masa Revolusi Prancis.

Baru sejak dua peristiwa sejarah itu, negara modern memiliki tata sosial yang disebut Hegel sebagai masyarakat sipil atau "civil society".

Hegel menyatakan bahwa sebelum dia, pemikiran tentang *civil society* masih tercampur aduk dengan konsep negara. *Civil society* secara ringkas berarti dunia kehidupan individu-individu anggotanya yang harus dibedakan dengan kelompok masyarakat natural atau keluarga. Hegel menegaskan bahwa *civil society* bukanlah keluarga yang merupakan ruang privat berasas cinta, bukan pula negara yang secara eksplisit merupakan komunitas publik berlandaskan rasionalitas dan memiliki tujuan-tujuan kolektif atau universal. *Civil society* adalah ruang di mana semua individu berada sebagai person dan subjek, pemilik dan pengatur hak milik pribadi dan penentu pilihan bagi aktivitasnya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang tertentu dan subjektif. Dalam *civil society*, tujuan setiap orang adalah murni pribadi, partikular dan tertentu, bukan komunal, berbagi perasaan (keluarga) atau rasionalitas (negara). Pendek kata, di satu sisi, *civil society* adalah dunia pasar ekonomi.²⁵⁰ Hegel menegaskan bahwa setiap individu saling memberi sebagai orang-orang bebas dan saling menerima aktualitas sebagai subjek, hanya jika mereka saling bergantung untuk kehidupan dan kesejahteraan mereka (PR § 182). Di sisi lain, *civil society* tidaklah secara sederhana identik dengan pasar ekonomi. Sebagai bagian dari *civil society*, setiap orang memiliki identitas sosial tertentu berdasarkan *self interest* mereka sendiri sebagai pengakuan bahwa manusia adalah *homo economicus*.

Kebebasan dalam *civil society* memuat banyak hal selain yang paling sederhana, yakni membiarkan orang menemukan jalan hidupnya di dalam sistem pasar. Jika menjadi bagian dari *civil society*, orang harus juga mencapai identitas sosial tertentu, misalnya pedagang, atau profesi lain. *Civil society* tempat kebebasan bagi individu. *Civil society* menawarkan keanekaragaman agar dapat dipilih.

²⁵⁰ Allen W. Wood, "Editor's Introduction," dalam Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, hlm. xviii.

Civil society adalah bentuk yang paling pas pada masa modern karena di dalamnya, masing-masing individu bebas dengan hak miliknya membentuk organisasi ekonomi. Model ekonomi keluarga, klan, feodal, tidak lagi punya legitimasi (PR § 172, 177). *Civil society* adalah suatu asosiasi dari para anggota yang independen yang di dalamnya setiap orang yang memiliki kebutuhan adalah prinsip pertamanya. *Civil society* merepresentasikan saat pemisahan dan perbedaan yang di dalamnya, moralitas (*sittlichkeit*) nampaknya larut dalam partikularitas dan egoisme. *Civil society* memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru yang tercipta darinya, bukan natural. Keharusan untuk mengorientasikan diri dengan orang lain dalam hidup bersama yang rutin dan dalam cara-cara tertentu (Cara berpakaian, makanan, dll.) menimbulkan individualitas natural dari masing-masing anggota *civil society* menuju universalitas yang formal dalam kebudayaan, universalitas yang belum disadari. Dalam *civil society*, universalitas memiliki bentuk kehadiran langsung, bebas, dan sadar.

Dalam *civil society*, ada tiga sektor utama, yakni pertanian, industri dan perdagangan, serta pelayanan masyarakat. Dari industri dan perdagangan, masing-masing pekerja atau profesional membentuk korporasi. Korporasi memiliki tanggungjawab kolektif dan tujuan yakni memelihara bisnis tertentu, melakukan training, dan menentukan standar mutu. Korporasi adalah representasi politik awali yang populer (PR, § 303, note 1). Keanggotaan korporasi diisi oleh individu-individu dengan identitas sosial yang konkret. Nampak bahwa aktivitas ekonomi tidak berhenti sekedar pencarian individual atau keluarga, tapi terus didorong untuk memberikan kontribusi konkret pada kesejahteraan keseluruhan. Tatanan sosial-moral pada diri profesional terwujud ketika seorang profesional memiliki kehormatan diri (*profesional honour*), yaitu ketika berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Para pegawai pelayan masyarakat tidak perlu korporasi karena segalanya dijamin oleh masyarakat. Korporasi tidak cocok di desa karena masyarakat desa cenderung masyarakat yang disposisi etisnya tidak reflektif (PR § 250), tidak pula cocok bagi buruh (PR § 252R)

Civil society mempunyai tendensi menciptakan ekstrim kaya atau miskin. Dalam *civil society* proses ekonomi terjadi dan menghasilkan kelas-kelas yang tidak termasuk dalam konsep kemakmuran *civil society*, keuntungan spiritual, dan tatanan moral-sosial (PR § 243-244). Hegel menolak menyalahkan kemakmuran atau kemiskinan sebagai hal individual karena fakta kemiskinan terjadi di *civil society*. Kemiskinan itu karena degradasi moral yang membuat orang cenderung berbuat salah dan mentalitas rakyat jelata yang bisa berkembang menjadi mentalitas kriminal. Kemiskinan menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan niat-niat baik secara moral. Hegel berpikir kasih sayang pribadi bukanlah solusi kemiskinan, tapi malah memperburuk. Dalam *civil society*, negara adalah institusi yang paling bertanggungjawab untuk mencegah kemiskinan dan mentalitas rakyat jelata

Keluarga dan *civil society* beda dengan negara. Keduanya partikular, sedangkan yang terakhir universal. Tetapi, keduanya memiliki kontribusi pada tatanan moral-sosial yang membuka individu pada cakrawala universal. *Civil society* menentukan konstruksi politik negara. Menurut Hegel, bentuk yang paling baik adalah monarki konstitusional karena memiliki lembaga perwakilan yang sifatnya legislatif dan konsultatif. Kebebasan tidak akan aktual secara penuh sampai kita bersama diri kita sendiri sampai pada tujuan akhir yang mencakup universalitas. Kita tidak dapat bebas kecuali kita sukses menggapai tujuan yang lebih besar dari kebaikan-kebaikan pribadi. Negara adalah komunitas secara keseluruhan dengan segala institusinya (PR § 267). Syarat untuk menjadi warga negara adalah level yang lebih tinggi dalam kebebasan, yakni memiliki disposisi politik dan memiliki patriotisme (PR § 258). Patriotisme itu tidak sama dengan heroisme. Patriotisme adalah kebiasaan menjalankan tatanan sosial-moral dan moralitas sambil melihat bahwa negara menjadi tujuan dan dasar substansial (PR § 268)

Tujuan universal yang absolut dalam negara adalah individualitas yang cukup dalam dirinya sendiri. Negara sendiri juga merupakan tujuan absolut dari masing-masing individu. Individu seharusnya

menempatkan tujuan ini lebih dari semua *self interes* yang dimilikinya. Negara memiliki hukum tertinggi dalam relasi dengan individu yang kewajiban tertingginya adalah menjadi warganegara (PR § 258). Negara haruslah rasional. Rasionalitas negara nampak dalam kesatuan tujuan antara universalitas dan individualitas. Negara rasional modern membutuhkan tiga elemen dasar, yakni hukum rasional, pemerintahan dan moral.²⁵¹ Negara menurut Plato memiliki elemen kedua dan ketiga. Negara menurut kaum revolusioner dan liberal hanya mengenal hukum rasional. Maka, negara rasional adalah mahkota dan dasar bagi kerja moral yang meningkatkan hal-hal partikular ke universal, mendidik individu untuk memenuhi dirinya sendiri untuk memberikan dirinya bagi keseluruhan.

Kerajaan Prusia adalah model yang paling mirip dengan negara rasional yang dipikirkannya karena Prusia merepresentasikan agama Protestan dan otoritas monarki. Kristen Protestan adalah agama yang menjamin kebebasan individu mengimani Tuhan tanpa perbedaan, diskriminasi, dan lepas bebas dari belenggu material dan hierarki. Sementara, monarki konstitusional adalah bentuk negara yang mempertahankan prinsip-prinsip tradisional (monarki) sekaligus memberi tempat pada gagasan yang organis dan rasional (konstitusional).

Secara umum, Hegel menilai realitas politik sebagai berikut: hanya di dalam dan oleh negara, individu mencapai realitas hidupnya yang sejati karena hanya di dalamnya dan olehnya individu sampai pada universalitas. Hanya negara yang dapat bertindak secara universal dengan menjalankan hukum. Moralitas, yang mencari universalitas, dapat diaktualisasikan hanya dengan cara dikonkretkan dalam institusi dan aturan-aturan. Aturan atau moral (*sittlichkeit*) adalah hidup negara dalam individu. Dalam negara, individu bisa melampaui egoismenya yang spontan dan primitif. Aktivitas negara yang memberi individu pelatihan dan pendidikan.

²⁵¹ Pierre Hassner, "Georg W. F. Hegel", (ter. Allan Bloom), dalam Leo Strauss dan Joseph Cropsey (eds.) *History of Political Philosophy* (3rd Edition). University of Chicago Press, Chicago, 1987, hlm. 742.

Menurut Hegel, negara membangun tujuan akhir bagi individu yang mencari di dalamnya kebenaran akan eksistensinya, tugasnya, kepuasannya, dan bahwa negara menyatakan aktualisasi atau penampakan atas keilahian dalam dunia eksternal. Hubungan negara dan individu secara esensial timbal balik. Dalam negara, setiap individu mengambil bagian hidup di dunia ini, melampaui segala kecenderungan pribadi yang disebutnya Jiwa Subjektif. Negara adalah tahapan Jiwa Objektif yang memperkenalkan dan memungkinkan individu sampai pada Jiwa Absolut. Jiwa absolut menjadi sumber bagi seni, religi, dan filsafat yang dalam arti tertentu semuanya itu melampaui negara. Hegel ingin melawan kaum romantik yang anti negara sekaligus kaum utopis dan reformis yang hanya mampu membayangkan negara ideal.

ANALISIS SITTLICHKEIT DAN BONUM COMMUNE

***Bonum Commune* Adalah Tujuan Akhir (Teleos) Polis**

Apakah tatanan moral-sosial merupakan tujuan akhir dari negara?

Gagasan tatanan moral-sosial memang tujuan akhir dari roh objektif, tapi belum tujuan akhir secara keseluruhan dari Roh Absolut. Tatanan moral-sosial (*sittlichkeit*) memang sangat penting dalam teori moral sekaligus politik Hegel meskipun seringkali disalahmengerti. Gagasan ini menjadi roh dasar yang bekerja pada seluruh tatanan sosial sehingga membuat setiap tatanan sosial mampu mencapai tujuan-tujuannya dan mengarahkan diri ke situasi yang semakin universal. Dalam setiap tatanan sosial, tatanan moral-sosial dijadikan tolok ukur keberhasilan sehingga setiap tatanan sosial perlu mengembangkannya.

Meskipun demikian, tatanan moral-sosial tidak pernah menjadi tujuan yang statis. Sebagaimana sistem filsafat Hegel yang dinamis dalam bentuk dialektis, tatanan moral-sosial ini bisa dipandang sebagai sarana yang mengantar roh pada pengenalan diri ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi dan lebih universal. Tatanan moral-sosial berhenti sebagai tujuan dan sarana ketika negara sudah mampu menghantar

individu-individu sampai pada pengenalan akan Roh Absolut dalam dirinya sendiri.

***Bonum Commune* Diusahakan oleh Orang Berkeutamaan (Aristoteles), Raja yang Santo (Thomas Aquinas)**

Bagaimanakah dengan tatanan moral-sosial?

Tujuan masyarakat dan tujuan sejarah akan sungguh-sungguh terealisasi di tangan orang-orang bebas. Orang-orang bebas itu adalah orang yang dalam tataran moral benar-benar telah menghidupi tatanan moral-sosial di setiap tatanan atau struktur sosial yang ada. Dalam keluarga, orang yang menghidupi tatanan moral-sosial adalah orang yang tidak mengabaikan kewajibannya sebagai anggota keluarga (menghidupi pernikahannya, mengumpulkan kekayaan dan aset, serta mendidik anak) sekaligus orang yang memiliki peran dalam *civil society* berdasarkan peran dan fungsi keanggotaannya (profesional atau pelayan masyarakat). Seorang profesional memiliki tatanan moral-sosial dalam bentuk kehormatan profesional, sedangkan pelayan masyarakat memiliki jiwa patriotisme yang tidak hanya sekedar heroik, tapi menghidupi sungguh setiap tatanan moral sosialnya.

TANGGAPAN

1. Hegel sangat disiplin menjalankan sistem filsafatnya dalam gagasan tentang tatanan moral-sosial

- Harus diakui bahwa mempelajari pemikiran Hegel tidaklah mudah. Kita perlu memahami sistem filsafatnya yang dialektis dan berproses dalam triade-triade. Ia menjelaskan bahwa setiap proses pengenalan diri Roh, Roh selalu melewati tiga tahap. Dalam setiap tahap, ada lagi tiga tahap di dalamnya. Dst. Meskipun berlapis, kita bisa mengerti bahwa keinginan Hegel adalah mengarahkan diri dari pengetahuan atau kesadaran abstrak/formal (tesis), mencari bentuk-bentuk perwujudan yang lebih konkret meskipun bertentangan

(antitesis), dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengatasi semua (sintesis)

- Hati-hati juga pada pemahaman tentang apa itu yang real, yang abstrak, yang individual dan yang universal. Seringkali, orang terjebak pada pemahaman keliru bila tidak mencermati dengan sungguh-sungguh. Misalnya, tatanan moral-sosial sebenarnya dalam perbincangan kita sekarang masihlah abstrak, tidak konkret dalam rupa bentuk-bentuk tindakan. Akan tetapi, Hegel mengatakan bahwa moralitas Kant jauh lebih tidak konkret karena masih ditataran formal/abstrak. Bisa jadi, memahami "kategoris imperatif" Kant jauh lebih konkret karena kita bisa merasakan pengalaman misalnya suara hati.

2. Sintesis antara etika Aristoteles dan Kant

- Franz Magnis Suseno melihat bahwa gagasan tentang tatanan moral-sosial ini adalah sintesis dari dua doktrin moral, yakni etika Aristotelian dan etika Kantian.²⁵² Dalam etika Aristotelian, berkeutamaan atau beretika adalah kunci berpolitik. Orang yang memperjuangkan keutamaan, akan mengalami kepenuhan ketika ia terlibat dalam kehidupan polis secara nyata, misalnya taat hukum, membela negara, dsb. Etika Kantian sendiri beranjak dari pengandaian dasar bahwa manusia pertama-tama adalah subjek yang otonom. Subjek yang otonom atau bebas tentu melakukan kebaikan bukan pertama-tama karena diwajibkan oleh kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, tetapi oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, dirinya sendirilah yang mengharuskan atau mewajibkan untuk berbuat baik. Hegel memandang bahwa Kant kurang konkret dan terkesan formal. Kewajiban diri untuk bertindak baik harusnya diarahkan pada hal-hal yang objektif dan universal, bukan individual.

²⁵² Bdk. Franz Magnis Suseno, "Hegel tentang Moralitas dan Struktur Sosial", hlm. 113

3. Antara konservatif dan revolusioner

- Oleh beberapa pakar setelah kematian Hegel, pemikiran Hegel ini cenderung dipandang di antara konservatisme dan revolusioner.²³¹ Hegel dianggap konservatif karena ia memasukkan kekagumannya pada pengaruh nilai-nilai keutamaan kristiani yang ia yakini (Protestantisme) dan keunggulan Kerajaan Prusia bagi perubahan sejarah dunia ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, beberapa pengagumnya justru melihat bahwa Hegel adalah sosok revolusioner. Para komentator ini mengagumi pemikiran Hegel yang terus menerus mencari cara untuk merealisasikan dunia yang lebih baik, yang menyatukan secara harmonis dua oposisi, yakni individu dan negara, yang berupa negara rasional yang menjamin kebebasan sejati masing-masing individu. Menurut Anda?

SUMBER BACAAN

1. Ameriks, Karl (ed.). 2005. *The Cambridge Companion to German Idealism*. Cambridge: University of Cambridge.
- Anastasia Jessica Adinda. 2016. "Bonum commune dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial". Makalah Extension Course 2016. Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
- Budi Hardiman. 2004. *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fernandez, Jose Luis dan Soto, Maria Jesus. 2006. *Historia de la filosofia moderna*. Pamplona: Eunsa.
- Hassner, Pierre "Georg W. F. Hegel". (terj. Allan Bloom). dalam Straus, Leo dan Joseph Cropsey (eds.) 1987. *History of Political Philosophy* (Third Edition). Chicago: University of Chicago Press.
- Hegel. 2003. *Elements of the Philosophy of Right*. (edited by Allen W. Wood) Cambridge: Cambridge University Press.
- Herlina Yoka Roida. "Bonum commune dalam Gagasan Para Pemikir Pasar Bebas: Moral dan Modal". Makalah Extension Course 2016. Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

²³¹ Peter Singer, "Hegel", hlm. 203-304.

- Lily Tjahjadi, Simon Petrus. 2004. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nadres, Ramon. "Bonum Commune dalam Pemikiran St. Thomas Aquinas: Sang Raja, Santo, dan Bonum commune". Makalah, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Raunch, Leo. "Hegel, Spirit, dan Politics". dalam Salomon, Robert C. and Kathleen M. Higgins (eds.). 2004. *Routledge History of Philosophy Volume 6*. New York: Roudledge
- Singer, Peter. 1997 "Hegel". dalam *German Philosopher*. Oxford: Oxford University Press.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yovel, Yirmiyahu. 2005. *Hegel's Preface of Phenomenology of Spirit*. Princeton: Princeton University Press.

Sittlichkeit dan Bonum Commune ala Hegel

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

acikerisim.uludag.edu.tr

Internet Source

<1%

2

123dok.com

Internet Source

<1%

3

joelbenyamin.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On